



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Renja Sekretariat Daerah;
- b. Renja Sekretariat DPRD;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Renja Dinas Kesehatan;
 3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Renja Dinas Sosial;
 8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renja Dinas Perhubungan;
 15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renja Dinas Pariwisata;
 18. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Renja Kapanewon Sanden;
 3. Renja Kapanewon Kretek;
 4. Renja Kapanewon Pundong;
 5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renja Kapanewon Pandak;
 7. Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Renja Kapanewon Bantul;
 9. Renja Kapanewon Jetis;
 10. Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Renja Kapanewon Pleret;
 14. Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Renja Kapanewon Sewon;
 16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
 17. Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Djundiangkan di Bantul

pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

SETDA

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Ketugasannya sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mampu menjalankan peran kedudukannya. Selanjutnya ketugasannya diwujudkan dan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk pencapaian tujuan.

BKPSDM menyusun Renja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024. Renja BKPSDM memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Dokumen Renja BKPSDM Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

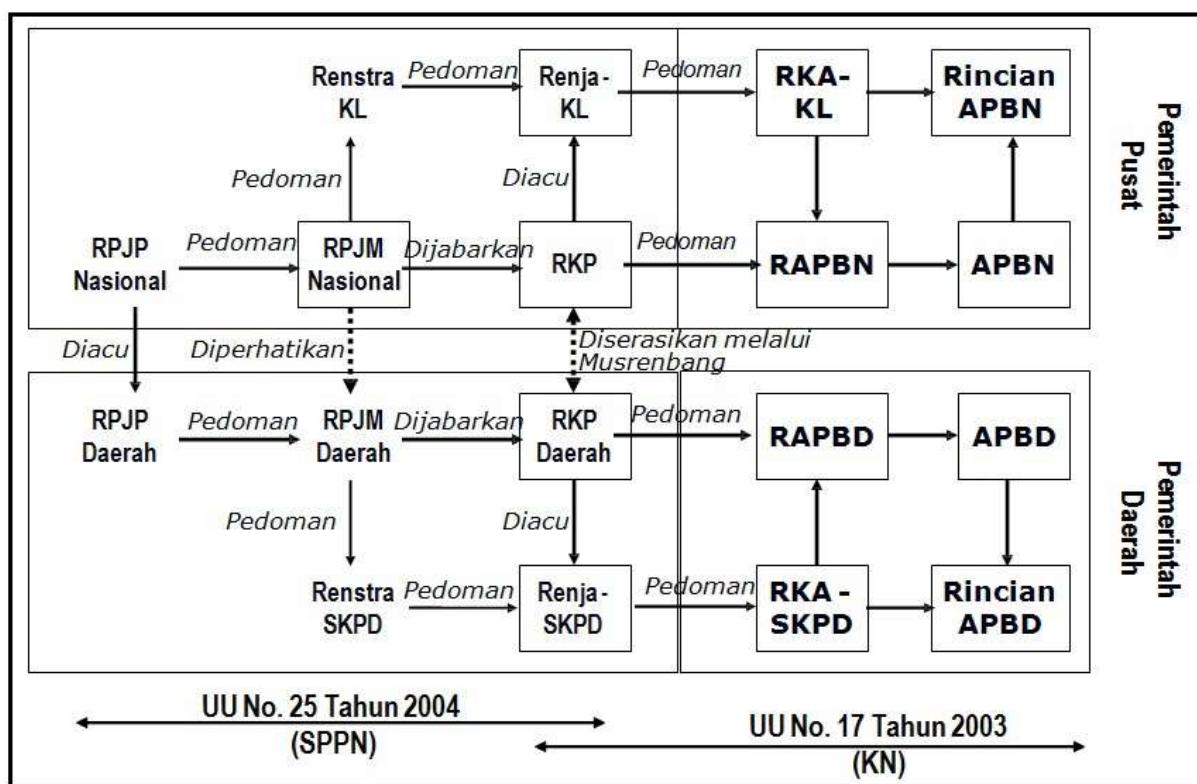
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja BKPSDM merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul; dan
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja BKPSDM Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi BKPSDM dalam penyusunan RKA BKPSDM Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan BKPSDM Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	20	18,35	91,75%
4.01.04.2.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100	100	100%
4.01.04.2.02.08	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan	59	59	100%
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	82,43	82,64	100%
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85	85	100%
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	7	7	100%
5.03.01.2.01.06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	5	5	100%
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95	95	100%
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
			(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pembayaran TPP	14	14	100%
5.03.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	18	18	100%
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97	97	100%
5.03.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	54	54	100%
		Materai	300	300	100%
5.03.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	15	15	100%
5.03.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan	4	4	100%
		penggandaan	119438	104.294	87%
5.03.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	24	24	100%
5.03.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	60	62	103%
		Laporan Penerimaan Tamu	25	25	100%
		Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	53	54	102%
		Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	35	40	114%
5.03.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	2	2	100%
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	90	100	111%
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	11	11	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
5.03.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman/Pos	75	68	91%
5.03.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon	12	12	100%
		Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	12	12	100%
5.03.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	13	100%
5.03.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	24	24	100%
		Pengelolaa Keuangan dan Barang	204	204	100%
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	100	102%
5.03.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	24283	24.280	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	12	12	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6	6	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	12	12	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	6	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80	98	122%
		Peta Kompetensi ASN	6	17,36	289%
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	100	100	100%
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	95	98	103%
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Usulan formasi	1	1	100%
		Proyeksi Jumlah ASN	7.842	7939	101%
		Seleksi calon ASN	2.000	761	38%
5.03.02.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	Verifikasi ASN Pensiun	530	535	101%
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Laporan updating data kepegawaian	24	24	100%
		Profil Kepegawaian	1	1	100%
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	79	98	124%
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Mutasi ASN	6.670	6713	101%
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	948	948	100%
5.03.02.2.02.03	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Promosi ASN	125	141	113%
		Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II dan III	52	60	115%
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	20,45	341%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	53	53	100%
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	250	286	114%
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	70	76	109%
		ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	78	78	100%
5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	PNS yang mengikuti diklat teknis, Struktural, fungsional dan prajabatan	1.271	1624	128%
5.03.02.2.03.13	Sub. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	4.350	4364	100%
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Percentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	95	98	103%
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	7.889	7855	99,57%
		Evaluasi Kinerja Eselon II (bidang kesehatan)	20	20	100%
5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1.344	1344	100%
		Pemberian Penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari	13	12	92%
		Jenis prestasi ASN	4	4	100%
		Penghargaan PNS berprestasi	293	273	93%
		PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	1.650	1676	102%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen LHKPN	111	111	100%
		Penanganan kasus disiplin	8	11	138%
		Rekomendasi Uji kesehatan	4	1	175%
		Penanganan kasus perceraian	20	23	115%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja BKPSDM Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perubahan target dari Paniradya DIY
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Beberapa kegiatan dilaksanakan secara <i>paperless</i>
3.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sebagian besar pengiriman berkas/dokumen via <i>online</i>
4.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Target peserta seleksi adalah umum. Namun, Kebijakan Pemerintah menentukan peserta seleksi calon PPPK adalah mereka yang sudah terdata dalam database Dapodik kemendikbud dan SIMSDK Kemenkes
5.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Satu kategori inovator juara Kartika Punggawa Projotamansari (KPP) belum diberikan pada tahun 2022 karena keterlambatan turunnya hasil dokumen verifikasi dari pusat; - Kurang optimalnya partisipasi OPD dalam pengusulan peserta PPPK penerima penghargaan - Jumlah usulan penghargaan satya lencana karya satya sebanyak 293 PNS, namun setelah diverifikasi oleh Setmilpres yang disetujui hanya 273 PNS

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (<i>Paniradya Kaistimewan DIY,dll</i>)
2.	Sub. Penyelenggaraan Keistimewaan Kegiatan Diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (<i>Paniradya Kaistimewan DIY,dll</i>) - Partisipasi aktif dari peserta diklat
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesesuaian dokumen dalam komponen penilaian Sakip
4.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen dan Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat)
5.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat) - ketersediaan data perencanaan; - Kepatuhan terhadap jadwal.
6.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi SIPD, Sakip, dll; - Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan.
7.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
8.	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketepatan perencanaan penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan Kinerja
10.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
11.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
12.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan; - Adanya dukungan data; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
13.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan
14.	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
15.	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dan tersedianya bahan bacaan; - Tersedianya pilihan penyedia bahan bacaan.
16.	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
17.	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
18.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
19.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
20.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
21.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemudahan dan ketersediaan penyedia jasa telekomunikasi
22.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia
23.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kemudahan dan ketersediaan penyedia
24.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
25.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan kendaraan; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
26.	Program Kepegawaian Daerah	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
27.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
28.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pusat.
29.	Sub. Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pembina. - Dukungan pengelola kepegawaian perangkat daerah
30.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antar bidang dalam proses updating data kepegawaian; - Ketersediaan sumber daya yang memadai.
31.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
32.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
33.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pembina.
34.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
35.	Kegaitan Pengembangan Kompetensi ASN	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
36.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara; - Ketersediaan data.
37.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama yang baik dengan pihak terkait; - Ketersediaan SDM assessor; - Ketersediaan sarana penunjang.
38.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.
39.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat; - Kesadaran ASN dalam pengembangan komptensi.
40.	Sub. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi angka kredit PNS jabatan fungsional.
41.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
42.	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Ketersediaan aplikasi; - Kesadaran ASN untuk Menyusun dokumen penilaian kinerja; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
43.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik oleh pelaksana kegiatan.
44.	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Kesadaran ASN terkait kedisiplinan dan kode etik pegawai.

Berdasarkan uraian faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak/stakeholder terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (Sistem Informasi Kepegawaian) dalam pelayanan kepegawaian
3. Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk penyebarluasan informasi kebijakan bidang kepegawaian; dan
4. Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	69 Nilai	57,44 Nilai	Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 pihak meliputi: (1) Manfaat bagi Pegawai ASN; (2) Manfaat bagi Instansi Pemerintah; (3) Manfaat bagi Masyarakat.

Sesuai pencapaian IKU BKPSDM Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU BKPSDM yang tidak memenuhi target adalah Capaian Indeks Profesionalitas ASN.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. perubahan mekanisme penilaian dari penilaian mandiri (self assessment) ke metode pengukuran langsung dalam sistem SAPK BKN;
- b. perubahan kebijakan /regulasi dalam manajemen ASN (penyetaraan jabatan, pengelolaan kinerja, manajemen jabatan fungsional dan mekanisme pengukuran Indeks Profesionalitas ASN);
- c. belum adanya interkoneksi antara sistem kepegawaian BKPSDM dengan aplikasi SAPK BKN.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah BKPSDM merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh BKPSDM. Isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM antara lain:

1. Penyesuaian dengan mekanisme kerja baru yang mengharuskan ASN lebih *agile*;
2. Adanya kebijakan terkait kepegawaian yang diantaranya kebijakan pengembangan kompetensi bagi PNS;
3. Adanya kebijakan penilaian kinerja ASN;
4. Adanya kebijakan pengadaan ASN dan pengelolaan tenaga non ASN;
5. Adanya kebijakan tentang pola karir PNS serta Standar Kompetensi Jabatan yang harus ditindaklanjuti;
6. Tersusunnya peta kompetensi sebagai dasar penilaian ASN.

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Kuantitas sumber daya manusia cukup memadai	Belum maksimalnya kompetensi sumber daya manusia di BKPSDM Kab. Bantul
Tersedianya teknologi informasi	Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi
Adanya komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	kualitas data kepegawaian belum maksimal

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Kebijakan Manajemen Kepegawaian dari Pemerintah Pusat	Kebijakan sistem merit
Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik
Tawaran pengembangan kompetensi bagi ASN	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan BKPSDM pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi aplikasi di bidang kepegawaian;
2. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN
3. Updating data kepegawaian secara menyeluruh;
4. Penerapan Sistem Merit secara optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDM Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan ****)	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	40 Persen	741.084.500	4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	25 Persen	652.500.000	
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan*** *)	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	741.084.500	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	652.500.000	
	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota* ***)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	741.084.500	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	652.500.000	
	5.03. 01 Program Penunjang Urusan	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.55 Angka	8.751.641.490	5.03. 01 Program Penunjang Urusan	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.55 Angka		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95.4 Persen	13.415.875	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.500.000		
	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.249.650	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000		
	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.166.225	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.500.000		
	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.4 Persen	6.889.798.025	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.4 Persen	7.185.740.790		
	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	6.741.903.900	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	7.037.580.790		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	
	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nan/Semesteran SKPD	22 Laporan	4.734.125	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5.000.000	
	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97.2 Persen	1.254.749.000	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97.1 Persen	1.207.441.305	
	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	193.526.380	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	343.734.565	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	26.591.400	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	18.580.500	
	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	51.907.212	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.589.240	
	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.904.000	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	
	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	7.500.000	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	9.500.000	
	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	920.572.180	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	427.367.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	21.747.828	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	30.820.000	
	5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	4 Dokumen	30.000.000	5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	2 Dokumen	323.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	237.784.590	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	144.407.680		
	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.100.000	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000		
	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.314.000	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.200.000		
	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.776.000	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.360.000		
	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	24 Laporan	69.594.590	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	24 Laporan	51.847.680		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Umum Kantor		Kantor yang Disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Kantor yang Disediakan			
	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	355.894.000	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	292.626.500	
	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	355.894.000	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	292.626.500	
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	81 persen	1.979.972.500	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	98 persen	7.797.345.080	
			Peta Kompetensi ASN	12 persen	3.944.595.000			Peta Kompetensi ASN	40 persen		
			Persentase Penanganan	100 persen	453.429.000			Persentase Penanganan	100 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Terhadap Pelanggaran Disiplin					Terhadap Pelanggaran Disiplin			
	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Percentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	1.335.135.500	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Percentase Keakuratan Data ASN	98 persen	1.239.742.080	
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	14.000.000	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	7.687.500	
	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.186.000.000	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	919.556.900	
	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	504 Dokumen	76.015.000	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	530 Dokumen	238.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Laporan updating data kepegawaian	24 Dokumen	65.120.500	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	25 Dokumen	74.047.680		
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Percentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional	80 Persen	638.837.000	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Percentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional	98 Persen	750.100.000		
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	800 Dokumen	481.574.000	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	800 Dokumen	657.225.000		
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	157.263.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	925 Dokumen	92.875.000		
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Percentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Persen	3.944.595.000	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Percentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20,5 Persen	5.004.178.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	14.250.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	4.750.000	
	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	500 Dokumen	68.500.000	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	3000 Dokumen	192.700.000	
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	136.250.000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85 Orang	42.170.000	
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	3.626.408.000	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	4.350.308.000	
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	4950 Orang	99.187.000	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	4950 Orang	14.250.000	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	90 Persen	453.429.000	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	98 Persen	803.325.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8671 Dokumen	33.550.000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7884 Dokumen	299.692.500	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	896 Orang	345.334.000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	230 Orang	434.632.500	
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	110 Orang	74.545.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	35 Orang	69.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankhan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolaan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi dengan arah kebijakan perencanaan dan rekrutmen ASN secara terbuka dan independent, serta pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang akurat untuk peningkatan layanan kepegawaian;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur dan mewujudkan ASN yang berkarakter dengan arah kebijakan penempatan dan promosi secara kompetitif dan terbuka, serta Pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur;
3. Meningkatkan disiplin aparatur dengan arah kebijakan mewujudkan aparatur yang berintegritas dan disiplin serta pemberian tambahan penghasilan berbasis pada jabatan dan kinerja;
4. Menyelenggarakan urusan keistimewaan Yogyakarta pada urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah "Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan" dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahannya untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	42,315 Angka
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	71 Nilai

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						741.084.500,00							741.084.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						741.084.500,00							741.084.500,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian Internalisasi Keistimewaan Pada ASN di Kabupaten Bantul (%)				60	741.084.500,00			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi				741.084.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat				100	741.084.500,00	(Kapane won Bantul, KAB.		Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100	741.084.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
			Internalisasi (Persentase)						BANTUL)							
4.01.04. 5.02.000 3		Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan (Laporan)		1	1	1	741.084.500,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kabupaten Bantul	1	741.084.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							16.638.061.355,00							15.328.826.033,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						16.638.061.355,00							15.328.826.033,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				82,55	8.840.716.275,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.902.288.233,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)</i>				95.4	10.500.000,00		(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95.6	14.757.463,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00	6.00	10	5.000.000,00		(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	6.00	6.874.615,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>			7	7	7	5.500.000,00		(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	7	7.882.848,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.185.740.790,00					Pemantapan layanan publik berbasis			6.939.577.439,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	5.000.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	22	5.207.538,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)				97.2	1.207.441.305,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		97.3	1.286.979.682,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						343.734.565,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			199.569.508,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.01.2.06.0003		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	12	12	343.734.565,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM dan ASN Kab. Bantul, BKPSDM Kab. Bantul	12	199.569.508,00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.580.500,00							29.250.540,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5.03.01.2.06.0005	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		12	12	12	18.580.500,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	29.250.540,00		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					50.589.240,00							54.502.573,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.01.2.06.0006		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	12	12	50.589.240,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	54.502.573,00		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.000.000,00							3.194.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.01.2.06.0008		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		24	24	24	3.000.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kab. Bantul	24	3.194.400,00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					9.500.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		7.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		20	20	20	9.500.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kab. Bantul	20	7.500.000,00		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					427.367.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		936.040.050,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.01.2.06.0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		110	110	110	427.367.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kab. Bantul, BKPSDM Kab. Bantul	110	936.040.050,00		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.820.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		41.922.611,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.01. 2.06.001 1		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		2	2	30.820.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Publik	BKPSDM Kab. Bantul	2	41.922.611,00				
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4	323.850.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	4	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
5.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera (Persentase)			100	144.407.680,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)		Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	269.490.249,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>		12	12	12	5.000.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	13.310.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							5.000.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.310.000,00		
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	12	10.200.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	31.145.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan</i>		12.00	12.00	12.00	77.360.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12.00	134.164.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							77.360.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			134.164.800,00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.01.2.08.0004		Kantor yang Disediakan (Laporan)														
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	51.847.680,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Tenaga Non ASN BKPSDM Kab. Bantul	12	90.870.049,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)				98	292.626.500,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		98	391.483.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau		21.00	18.00	18.00	292.626.500,00	(Kapane won Bantul, KAB.	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	18.00	391.483.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					BANTUL)	Alokasi Umum								
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN (%) Peta Kompetensi ASN (%) Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin (%)			7.797.345.080,00	81				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.426.537.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN (Persentase)			1.239.742.080,00	95	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95	1.343.135.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk				7.687.500,00				Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis			16.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.02.2.01.0003	5.03.02.2.01.0003	Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)		1	1	1	7.687.500,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	si Pelayanan Publik	teknologi informasi	Pemerintah Kab. Bantul	1	16.000.000,00	Sumberdaya Manusia
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)		2	2	2	919.556.900,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Bantul	2	1.184.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						238.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			76.015.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.02. 2.01.001 1		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pemberhentian (Dokumen)		525	504	396	238.450.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kab. Bantul	402	76.015.000,00		
		Pengelolaan Data Kepegawaian			25	25	74.047.680,00	(Kapanan won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Bantul	25	67.120.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.02. 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional (Persentase)				80	750.100.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		80	649.318.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.02. 2.02.000 1	Pengelolaan Mutasi ASN						657.225.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			489.055.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.02.2.02.0002		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		3000	800	800	657.225.000,00	(Kapane won Bantul, KAB, BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kab. Bantul	800	489.055.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Persentase)		1400	800	800	92.875.000,00	(Kapane won Bantul, KAB, BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul	800	160.263.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					12	5.004.178.000,00	(Kapane won Bantul, KAB, BANTUL)			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		15	3.960.595.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.02.2.03.0002		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		75.00	40.00	16	4.750.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	si Pelayanan Publik	teknologi informasi		PNS	40.00	15.250.000,00	Sumberdaya Manusia
		Pengelolaan Assessment Center					192.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi				70.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0004	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)		350.00	500.00	2000	192.700.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kab. Bantul		500.00	70.500.000,00	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					442.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi				140.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
5.03.02.2.03.0005		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)		60	70	80	442.170.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS yang akan menempuh pendidikan lanjut		90	140.250.000,00	
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					4.350.308.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi				3.635.408.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.02. 2.03.001 4		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)		10	10	10	4.350.308.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, ASN Kab. Bantul, ASN Kabupaten Bantul, PNS	10	3.635.408.000,00		
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			4350	4650	14.250.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	5250	99.187.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.02. 2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian (Persentase)			90	803.325.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		90	473.489.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
5.03.02. 2.04.000 2		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					299.692.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.550.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
5.03.02. 2.04.000 4		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)		9149	9149	9149	299.692.500,00	(Kapane won Banrul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Bantul	9149	35.550.000,00		
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			896	896	434.632.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			360.334.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)		896	896	896	434.632.500,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Bantul	896	360.334.000,00		
5.03.02. 2.04.000 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)		143	143	141	69.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			77.605.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)		143	143	141	69.000.000,00	(Kapane won Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Bantul	139	77.605.000,00		
	J U M L A H						17.379.145.855,00							16.069.910.533,00		

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

